PEMERINTAH KALURAHAN BALECATUR GAMPING

Utamakan Pelayanan Prima dan Transparansi Anggaran

PELAYANAN prima di segala bidang kepada masyarakat menjadi salah satu bentuk keberhasilan suatu pemerintahan baik tingkat pusat hingga daerah. Parameter ini menjadikan warganya percaya jalannya pemerintahan baik pembangunan maupun pengelolaan anggaran.

Begitu pula Kalurahan Balecatur Kapanewon Gamping Sleman, selalu berusaha memberi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya agar warga puas dan percaya kinerja pemerintahan. "Pelayanan prima dan transparansi anggaran menjadi visi dan misi dari Kalurahan Balecatur. Program itu terus kita wujudkan dan diutamakan," kata Lurah Balecatur Andri Septiyanto di kantornya.

Dijelaskan, pelayanan prima yang dimaksud yaitu memberi kemudahan dan kecepatan yang dibutuhkan masyarakat seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian maupun surat penting lain. Untuk mendukung program tersebut, Kalurahan Balecatur memanfaatkan teknologi informasi secara online. Masyarakat tidak harus datang dan antre di kantor kalurahan. Tetapi dapat mengajukan dari rumah lewat webside yang tersedia.

KR-Istimewa

Lurah Balecatur Andri Septiyanto (kanan) menyerahkan akta kematian warga Balecatur.

Dicontohkan Andri, program Lokadesi merupakan layanan secara online untuk pembuatan akta kelahiran maupun akta kelahiran. Warga yang ingin membuat akta tersebut tidak harus mengajukan langsung ke kantor kalurahan, tetapi dapat mengisi data lewat handphone maupun perangkat komputer dari rumah masing-masing.

"Warga tinggal membuka aplikasi, mengisi data dan hari berikutnya datang ke kalurahan untuk mengambil surat yang diajukan. Untuk surat atau akta kematian, dapat diproses lebih cepat dan akan diserahkan oleh lurah atau pamong kalurahan saat pemakaman," ungkap Andri.

Begitu pula dalam melayani administrasi Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK) dan surat Kependudukan lain, Kalurahan Balecatur menyediakan layanan online Pos Adminduk. Program ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Kalurahan Balecatur sebagai pilot projec. "Pos Adminduk ini terkoneksi langsung dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman," terangnya.

Semua pelayanan tersebut, lanjut Andri, diberikan bagi masyarakat agar proses pembuatan surat lebih cepat namun tidak dipungut biaya. Jika masyarakat masih menemukan pungutan dalam membuat administrasi kependudukan dapat lapor langsung ke pemerintah kalurahan.

KR-Istimewa

Lurah Balecatur Andri Septiyanto.

Dalam pengelolaan anggaran, Kalurahan Balecatur juga selalu terbuka atau transparan. Dana yang diterima maupun digunakan untuk pembangunan selalu disampaikan ke masyarakat baik melalui website milik kalurahan. Agar jangkauan sosialisasi lebih luas, dibuat infografis terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) berbentuk baliho. Media luar ruang tersebut dipasang di halaman kalurahan dan beberapa ruas jalan strategis agar mudah dilihat dan dibaca masyarakat. "Dalam mengelola APBKal, kita selalu transparan. Masyarakat dapat mengetahui sumber anggaran pendapatan kalurahan serta pemanfaatannya," tandasnya.

Danarto (keuangan) Kalurahan Balecatur Andhi Jatmika menambahkan, APBKal Balecatur tahun 2022 sebesar Rp 5.307.991.493. Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Desa PAD) Rp 674.150.00, Dana Desa (DD) Rp 1.656.058.000, Penerimaan Bagi Hasil (PBH) Rp 669.497.350, Alokasi Dana Desa Rp 1.602.790.143, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rp 699.996.000 dan Pendapatan Lain-lain Rp 5.500.000.

Menurut Andhi, penggunaan anggaran APBKal secara administrasi sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah. Semua kegiatan pelayanan hingga pembangunan diunggah pada aplikasi dari pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat hingga kabupaten termasuk masyarakat dapat memonitoring. Selain transparansi, setiap kegiatan fisik dan non fisik terutama yang berkaitan dengan APBKal, diputuskan melalui rapat dari tingkat pedusunan.

Hasil rapat tersebut kemudian dibahas di kalurahan melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal). Hasil Muskal, kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kalurahan sebagai dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan 18 padukuhan di wilayah Balecatur. "RKP ini nantinya menjadi acuan untuk menyusun Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal)," imbuh Andhi.

Andhi berharap, agar visi dan misi Pemerintahan Kalurahan Balecatur dapat berjalan dengan baik serta sesuai harapan, masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di antaranya dengan menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat pada proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama menyangkut kamajuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **(Has)-f**

KR-Istimewa

Infografis APBKal Tahun 2022 Kalurahan Balecatur.

TINGKATKAN PENDAPATAN ASLI KALURAHAN

Maksimalkan Potensi Alam dan Sumberdaya Manusia

KR-Istimewa

Sumber air sumur bantuan APBN program Pamsimas sedang diuji fungsi bagi warga sekitar.

PEMERINTAH Kalurahan Balecatur terus berusaha menggali potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) atau yang dulu lebih dikenal Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) Balecatur tahun 2022 sebesar Rp 674.150.000. Nilai itu masih kita anggap sangat kecil.

Menurut Lurah Balecatur Andri Septiyanto, PAKal Balecatur paling besar bersumber dari tanah kas milik kalurahan yang disewa pihak swasta. Di antaranya PT KSM dan PT SKS dengan luas lahan sekitar lima hektare. Sedangkan tanah kas kalurahan lain belum dapat dikelola lebih maksimal. Untuk itu, berbagai langkah dan strategi terus dilakukan agar dari waktu ke waktu PAKal terus mengalami peningkatan. Sehingga kedepan dapat menjadi kalurahan mandiri, lebih maju yang berimbah meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dijelaskan Andri, beberapa cara akan dilakukan seperti pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan, memaksimalkan tanah kas kalurahan, menghidupkan kembali pasar tradisional milik kalurahan maupun yang lain.

Terkait tanah kas kalurahan, lanjutnya, sebenarnya pihak kalurahan telah mencoba menggandeng pihak ke tiga. Sayangnya, karena status tanah pertanian, maka banyak investor yang menolak dan batal untuk bekerja sama. "Tanah kas kalurahan pernah ada yang ingin menyewa untuk gudang. Tetapi izin pendiriannya sulit karena harus mengajukan alih fungsi lahan. Jika terus digunakan untuk pertanian, hasilnya juga kurang maksimal karena kendala irigasi dan hama yang sering menyerang hasil persawahan," ungkap Andri.

Namun, pihak kalurahan terus berusaha memaksimalkan potensi alam yang ada. Salah satunya dengan menggunakan tanah milik Kraton Yogyakarta (Sultan Ground) yang berada di wilayah Padukuhan Pereng Kembang. Lokasi tersebut akan dimanfaatkan sebagai objek wisata alam yang nantinya akan dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) kerja sama BUMKal Balecatur.

Saat ini, Pemkal Balecatur sedang proses mengajukan izin pemanfaatan lahan kepada pihak Kraton Yogyakarta agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Apabila izin disetujui, kalurahan bersama masyarakat setempat akan bergerak cepat.

Keberadaannya, tidak hanya menguntungkan warga sekitar, tetapi dapat diintegrasikan dengan Desa Wisata dan Budaya (Deswitadaya) Gamol di Padukuhan Gamol yang telah berjalan sejak tahun 2018. "Deswitadaya Gamol ini telah dikenal masyarakat luas. Maka, Pemkal Balecatur juga wajib mendorong agar semakin berkembang. Salah satunya dengan membuat objek wisata lain agar dapat terintegrasi dan lebih menarik wisatawan berkunjung ke Balecatur," terangnya.

Potensi alam lain yang kini menjadi skala prioritas adalah pemanfaatan sarana air bersih di Padukuhan Jitengan. Di lokasi tersebut telah dibangun instalasi sarana air bersih bantuan pemerintah pusat melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Bersumber dari sumur dalam (sumur bor), air tersebut sangat layak dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi maupun kebutuhan sehari-hari masyarakat. Debit air yang dihasilkan juga sangat besar dan dapat dimanfaatkan oleh penduduk di padukuhan-padukuhan sekitar.

Sumber air tersebut kini dikelola mandiri oleh warga dengan nama Tirto Sembodo. Saat ini baru melayani sekitar 70 KK, belum sesuai dengan debit air yang dihasilkan yakni untuk mencukupi sekitar 1.000 KK. Dalam pengelolaan, pengurus Tirto Sembada menarik biaya awal pemasangan jaringan air bersih sebesar Rp 300.000 untuk satu rumah. Retribusi bagi pelanggan Rp 15.000 perbulan dengan fasilitas gratis 5 kubik air. Kelebihannya, pelanggan dibebani biaya tambahan Rp 2.500 per kubik air.

Melihat potensi sumber air tersebut, Kalurahan Balecatur berencana mengelola lebih maksimal dengan cara membuat instalasi jaringan air bersih ke rumah-rumah warga yang membutuhkan. Nantinya, dalam pengelolaan atau penarikan retribusi dilakukan kerja sama antara Pamsimas dengan BUMKal. "Sumber air itu sangat potensial untuk dikelola. Sayang jika dibiarkan begitu saja. Agar pemanfaatannya lebih maksimal, dibutuhkan anggaran untuk membuat jaringan pipa air ke rumah-rumah warga. Tahun 2023, BUMKal ingin membangun jaringan itu," ungkapnya.

Danarto (Keuangan) Kalurahan Balecatur Andhi Jatmika menambahkan, keberadan pasar tradisional milik kalurahan di Padukuhan Bulak Gamol saat ini juga belum tergarap maksimal. Pasar yang berdiri sejak tahun 2003, belum beroperasi sesuai harapan karena masih banyak pemilik atau penyewa yang belum membuka kiosnya.

Lokasi strategis di pinggir jalan nasional ini, ke depan akan dihidupkan kembali dan mengajak para pedagang untuk membuka kiosnya secara bersama-sama. Sehingga masyarakat menjadi lebih tertarik untuk berbelanja di pasar tersebut. "Akhir tahun ini Pemkal Balecatur ingin bermusyawarah kepada pemilik kios dan mengajak secara bersama-sama menghidupkan kembali," ujarnya.

Target lain, imbuh Andhi, Kalurahan Balecatur ingin membangun kawasan olahraga secara terpadu (sport center) dengan memanfaatkan tanah kas kalurahan. Jika terlaksana, sport center ini dapat disewakan untuk menambah pendapatan Kalurahan Balecatur.

"Rencana pembangunan sport center ini sudah kita bicarakan dengan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa dan Anggota DPRD Sleman Gustan Ganda. Kita sedang menunggu perkembangannya," pungkas Andhi. **(Has)-f**

KR-Istimewa

Deswitadaya Gamol menjadi destinasi wisata unggulan di Kalurahan Balecatur, Gamping.

Percepat Peningkatan Ekonomi Warga

MENINGKATKAN perekonomian masyarakat tidak semudah melaksanakan pembangunan fisik. Meski mendapat anggaran sama besar, tetapi belum tentu program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan baik sesuai harapan. Berbagai cara atau strategi harus dijalankan dengan tepat dan cerdas supaya berbagai kegiatan benar-benar bermanfaat dan tepat sasar. Sehingga waktu dan anggaran yang telah dipersiapkan tidak terbuang sia-sia.

KR-Istimewa

Y Gustan Ganda

"Kunci kesuksesan pemberdayaan masyarakat berada pada program yang diusulkan masyarakat itu sendiri," kata Lurah Balecatur, Andri Septiyanto, Menurutnya, Kalurahan Balecatur terus berinovasi dan memanfaatkan segala potensinya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Cara ini diharapkan menjadi pengungkit agar perekonomian warganya menjadi lebih baik dan sejahtera.

Dijelaskan Andri, Pemkal Balecatur mulai fokus pada pembangunan perekonomian. Langkah ini ditempuh karena berbagai program kegiatan fisik telah banyak yang dibangun dan dilaksanakan. Infrastruktur jalan sudah masuk hingga ke kampung-kampung, begitu pula pembangunan fisik lain bukan menjadi sarana prioritas.

Bagi Kalurahan Balecatur, peningkatan sumberdaya manusia lebih utama dibandingkan hanya memberi bantuan bentuk modal usaha. Menyelenggarakan berbagai pelatihan maupun studi banding ke daerah lain yang telah berhasil, dapat meningkatkan ilmu dan pengalaman dalam mengembangkan usahanya. "Kita (Kalurahan Balecatur), lebih mengutamakan pelatihan-pelatihan supaya produk yang mereka hasilkan menjadi berkualitas dan mampu bersaing di pasaran," ujar Andri.

Danarto (keuangan) Balecatur Andhi Jatmika menambahkan, dalam pelatihan ini, pihaknya bekerja sama dengan dinas terkait dan kelompok-kelompok masyarakat yang telah berhasil dan berkembang. Memanfaatkan anggaran Dana Desa (DD), pelatihan tersebut bukan hanya cara membuat produk berkualitas, tetapi juga cara mengajukan izin-izin usaha seperti Nomor Induk Usaha (NIB), sertifikat halal, sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) maupun surat izin produksi lainnya. Pembuatan surat izin usaha tersebut, nantinya dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mengajukan bantuan anggaran ke pemerintah maupun memperkuat legalitas hasil produk-produk dari masyarakat.

Anggota DPRD Sleman Y Gustan Ganda menegaskan, kunci keberhasilan peningkatan ekonomi masyarakat terletak pada sumberdaya manusianya. Apabila mereka terampil dan kreatif dan ulet, secara otomatis usahanya menjadi berkembang dan maju. Untuk mencapai itu, dibutuhkan peningkatan keterampilan melalui berbagai. Baik ragam, kualitas produksi hingga pemasaran. Tak hanya disitu, mereka juga harus didampingi hingga pemasaran.

Cara lain, pelatihan dilaksanakan sesuai permintaan dan kebutuhan pelaku usaha. Artinya, harus dijaring dari bawah ke atas (bottom up). Apabila dipaksakan pelatihan berdasarkan program dari pemerintah, akibatnya tidak sesuai harapan masyarakat. "Kita harus dapat memprioritaskan usulan warga. Apabila kemampuan dan usahanya dibidang olahan makanan, jangan ditawarkan atau dipaksa pelatihan menjahit. Itu (pelatihan) menjadi sia-sia," terang Ganda.

Ketua Fraksi PDIP ini menegaskan, pemerintah telah mengucurkan anggaran ke kalurahan lewat beberapa sumber diantaranya Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 UU Desa, pemerintah tidak diperbolehkan memberi bantuan langsung ke tingkat masyarakat seperti RT, RW, padukuhan maupun kelompok masyarakat. Namun, BKK tersebut disalurkan melalui kalurahan. Sayangnya, BKK tersebut dapat dikucurkan dengan syarat satu program untuk satu kegiatan. Berapa pun anggarannya, pembangunan infrastruktur harus seragam. "Jika membangun infrastruktur jalan, semua kalurahan juga harus mengajukan proposal dengan kegiatan sama. Padahal belum tentu tiap kalurahan membutuhkan infrastruktur itu," terangnya.

Regulasi yang dinilai mengganggu perkembangan di Kabupaten Sleman ini akhirnya DPRD bersama Bupati Sleman merubah aturan tersebut. Yakni BKK dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan termasuk pelatihan keterampilan bidang kewirausahaan. Kemudahan-kemudahan ini harus ditangkap oleh pemerintah kalurahan secara bijak dan cerdas. Jangan sampai BKK yang nilainya cukup besar, terbuang sia-sia hanya karena salah dalam memanfaatkan. "Membangun sarana fisik itu lebih mudah. Tetapi yang paling sulit adalah membangun sumberdaya manusianya," ungkap Ganda.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM, KWT maupun kelompok tani yang berpotensi, menjadi lebih mudah, bermanfaat dan tepat sasaran dibandingkan memberi pelatihan kepada warga yang tidak berminat di bidangnya. "Ingat. Beri pelatihan maupun bantuan modal usaha kepada warga maupun kelompok yang serius dan benar-benar dibutuhkan mereka," pintanya.

Selain peningkatan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kalurahan juga wajib membantu pemasaran minimal di wilayahnya sendiri. Berbagai kegiatan yang melibatkan produk UMKM seperti rapat atau agenda lain, makanan yang dibutuhkan tidak beli dari luar kalurahan, tetapi berasal dari produk UMKM setempat. **(Has)-f**